

**IMPLEMENTASI DAN HAMBATAN KEBIJAKAN KEAMANAN PARKIR DI
UNIVERSITAS LAMPUNG: PENANGGULANGAN KEHILANGAN
KENDARAAN BERMOTOR**

Ujian Tengah Semester Metode Penelitian Administrasi Publik

Oleh

KHAYLA NISA AZFATHIN

2416041097



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Teori dan Konsep	10
2.2.1 Grand Theory	10
2.2.2 Middle Theory.....	10
2.2.3 Applied Theory	11
2.2.4 Efektivitas Kebijakan Publik dalam Prespektif Kualitatif	11
2.2.5 Fenomena Keamanan Parkir di Lingkungan Perguruan Tinggi.....	12
2.2.6 Tinjauan Terhadap Studi Terdahulu dan Kesenjangan Penelitian	12
2.3 Kerangka Pikir.....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	15
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	15
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	15
3.3 Fokus dan Objek Penelitian.....	16
3.4 Informan Penelitian	17
3.5 Jenis dan Sumber Data	17
3.6 Teknik Pengumpulan Data	17
3.7 Teknik Analisis Data	18
3.8 Uji Keabsahan Data.....	19
3.9 Etika Penelitian	19
3.10 Prosedur Penelitian.....	19
DAFTAR PUSTAKA	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jumlah mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini berdampak pada kebutuhan sarana transportasi pribadi yang semakin tinggi, terutama sepeda motor dan mobil pribadi sebagai moda utama untuk mobilitas menuju kampus. Kondisi ini secara langsung meningkatkan kebutuhan terhadap fasilitas parkir yang aman, tertib, dan terkelola dengan baik. Di sisi lain, pengelolaan parkir di banyak kampus sering kali belum sejalan dengan pertumbuhan kendaraan yang cepat, sehingga menimbulkan permasalahan berupa keterbatasan lahan parkir, penataan yang tidak efisien, serta lemahnya sistem keamanan (Rozaki, 2019).

Fenomena kehilangan kendaraan bermotor di area kampus telah menjadi persoalan berulang yang menimbulkan keresahan bagi sivitas akademika. Menurut Faujan (2022), masalah keamanan parkir merupakan bagian dari kualitas pelayanan kampus yang mencerminkan sejauh mana institusi mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh penggunanya. Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa meningkatnya intensitas kehilangan kendaraan bermotor di area kampus umumnya disebabkan oleh kurangnya pengawasan langsung, lemahnya sistem administrasi parkir, minimnya penggunaan teknologi keamanan seperti CCTV dan e-ticketing, serta keterbatasan jumlah petugas keamanan yang bertugas secara bergiliran (Prambudi, 2023).

Situasi serupa juga terjadi di lingkungan Universitas Lampung (Unila). Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah laporan kehilangan kendaraan bermotor di area parkir kampus muncul di media lokal dan forum mahasiswa. Laporan tersebut menyoroti lemahnya sistem penjagaan, ketidaktepatan prosedur pencatatan kendaraan, serta lambannya mekanisme tindak lanjut terhadap korban kehilangan. Beberapa mahasiswa bahkan menyampaikan bahwa klaim tanggung jawab pihak kampus sering kali tidak jelas, terutama karena adanya papan peringatan “kehilangan kendaraan bukan tanggung jawab pengelola parkir”. Hal ini menimbulkan dilema etis dan hukum, mengingat pengelolaan parkir dilakukan di bawah otoritas institusi pendidikan (Ombudsman RI Perwakilan Lampung, 2025).

Dalam konteks tata kelola organisasi publik, kampus memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menjamin keamanan lingkungan belajar, termasuk area parkir. Menurut Wahab (2017), implementasi kebijakan publik harus mampu mencapai tujuan utamanya melalui efektivitas pelaksanaan di lapangan, bukan hanya pada tataran peraturan tertulis. Artinya, keberhasilan kebijakan keamanan parkir di kampus tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya regulasi, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten, dipahami oleh pelaksana, dan dirasakan manfaatnya oleh pengguna layanan (Subarsono, 2016).

Dari perspektif manajemen kebijakan publik, implementasi kebijakan keamanan parkir melibatkan banyak aktor, antara lain pengelola fasilitas kampus, satuan pengamanan (satpam), pihak penyedia jasa parkir, dan pengguna (mahasiswa dan staf). Namun, dalam praktiknya sering muncul berbagai hambatan, seperti:

1. Ketidaksesuaian antara kebijakan tertulis dan pelaksanaan di lapangan.
2. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam memahami prosedur keamanan.
3. Keterbatasan sarana pendukung seperti kamera pengawas, sistem kontrol tiket, dan pencahayaan yang memadai.
4. Kurangnya koordinasi antarunit kampus dalam menangani laporan kehilangan (Fitria, 2021; Hardiyansyah, 2018).

Selain itu, dari sisi teoritis, masalah keamanan parkir dapat dianalisis menggunakan pendekatan *crime prevention through environmental design* (CPTED) yang menekankan pentingnya desain ruang dan pengawasan lingkungan untuk mencegah tindak kejahatan (Cozens & Love, 2015). Penerapan CPTED di kampus mencakup tata letak parkir yang memungkinkan visibilitas maksimal, penerangan yang memadai, serta sistem pemantauan berbasis teknologi (CCTV dan identifikasi digital). Namun, penelitian lapangan menunjukkan bahwa implementasi CPTED di institusi pendidikan Indonesia masih rendah karena keterbatasan anggaran, budaya keamanan yang belum terbentuk, serta persepsi bahwa pengawasan fisik sudah cukup menggantikan teknologi (Wijayanti, 2020).

Dari sisi kebijakan, pengelolaan parkir kampus tidak hanya berfungsi sebagai pelayanan teknis, tetapi juga merupakan bentuk kebijakan internal institusi publik yang memiliki implikasi sosial dan hukum. Menurut Nugroho (2020), kebijakan publik yang bersifat

pelayanan langsung kepada masyarakat harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu policy design (perumusan kebijakan yang jelas), policy implementation (pelaksanaan yang efektif), dan policy evaluation (pengawasan berkelanjutan). Dalam konteks Unila, kebijakan keamanan parkir perlu dievaluasi dari aspek efektivitas implementasi serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Pendekatan penelitian kualitatif sangat relevan untuk mengkaji fenomena ini karena memungkinkan peneliti memahami makna, persepsi, dan pengalaman aktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan keamanan parkir. Melalui wawancara mendalam dengan petugas keamanan, pengelola kampus, dan mahasiswa yang pernah menjadi korban kehilangan kendaraan, penelitian ini dapat menggali secara lebih dalam mengenai bagaimana kebijakan diterjemahkan ke praktik, serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi dinamika komunikasi antarunit, kapasitas sumber daya, serta persepsi risiko yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait (Creswell & Poth, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan keamanan parkir di Universitas Lampung bukan hanya persoalan teknis kehilangan kendaraan, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam implementasi kebijakan publik di lingkungan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana kebijakan keamanan parkir diimplementasikan, hambatan apa yang muncul di lapangan, serta strategi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem keamanan parkir di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan keamanan parkir di Universitas Lampung dalam upaya menanggulangi kehilangan kendaraan bermotor?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan keamanan parkir di Universitas Lampung, serta bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam bagaimana kebijakan keamanan parkir di Universitas Lampung diimplementasikan, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam dua

sasaran utama sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan keamanan parkir di Universitas Lampung dalam upaya menanggulangi kehilangan kendaraan bermotor.

Tujuan ini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan keamanan parkir dijalankan oleh pihak kampus, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, koordinasi antarunit, serta mekanisme evaluasi yang diterapkan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami pengalaman dan persepsi aktor-aktor pelaksana kebijakan secara mendalam.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan keamanan parkir di Universitas Lampung, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Tujuan ini dimaksudkan untuk menemukan faktor-faktor penghambat baik dari sisi struktural (kebijakan, sumber daya, sarana prasarana, dan koordinasi kelembagaan) maupun nonstruktural (sikap pelaksana, kesadaran pengguna, dan budaya organisasi). Hasil temuan diharapkan dapat menggambarkan strategi adaptif yang dilakukan oleh pihak kampus guna meningkatkan efektivitas kebijakan keamanan parkir.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara dan kajian implementasi kebijakan publik di lingkungan lembaga pendidikan tinggi. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur tentang praktik kebijakan keamanan lingkungan kampus yang selama ini masih terbatas dalam konteks Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti isu serupa dengan pendekatan kualitatif atau studi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan masukan bagi pihak Universitas Lampung dalam mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan kebijakan keamanan parkir, terutama terkait peningkatan sistem pengawasan, manajemen sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi keamanan.
- 2) Menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan pengelola fasilitas kampus dalam

merumuskan strategi pencegahan kehilangan kendaraan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

- 3) Memberikan pemahaman bagi sivitas akademika (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan) tentang pentingnya peran serta seluruh pihak dalam mendukung kebijakan keamanan parkir melalui kepatuhan terhadap prosedur dan budaya keamanan bersama.
- 4) Menjadi bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah daerah atau kementerian terkait dalam merumuskan pedoman pengelolaan parkir yang aman di lingkungan institusi publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang tertuang dalam tinjauan pustaka dibutuhkan agar penulis dapat membuat kerangka konseptual yang solid. Penelitian-penelitian ini berfungsi sebagai landasan teori yang kuat serta pedoman dalam menyusun alur penelitian secara sistematis. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti	Relevansi Penelitian
1.	Sarihayati Naina (2021)	Analisis Pengaruh Perilaku Juru Parkir, Kurangnya Lahan Parkir dan Jaminan Keamanan Terhadap Parkir Liar di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.	Penelitian ini menemukan bahwa parkir liar di Singaparna disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu perilaku juru parkir yang kurang tertib, keterbatasan lahan parkir, serta lemahnya jaminan keamanan. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya praktik parkir liar di wilayah tersebut.	Persamaan: Seluruh penelitian terdahulu mengkaji aspek perparkiran, baik dari sisi perilaku juru parkir, efektivitas penertiban, jaminan keamanan, maupun pengelolaan lahan parkir. Sama seperti penelitian ini, mereka sama-sama menekankan pentingnya manajemen parkir dalam mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat.

				Perbedaan: Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti konflik sosial, efektivitas regulasi, dan keterbatasan sarana parkir di ruang publik seperti wisata, jalan umum, dan terminal. Sementara itu, penelitian sekarang lebih fokus pada hubungan efektivitas kebijakan keamanan parkir dengan tingkat kehilangan kendaraan bermotor di lingkungan universitas.
2.	Indah Tri Madyati Hrp (2023)	Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Medan (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Medan)	Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan retribusi parkir di Kota Medan belum efektif. Masih banyak terjadi parkir liar dan	Persamaan : Penelitian ini dalam hal sama-sama membahas kebijakan publik terkait perparkiran serta menekankan

			ketidaktertiban juru parkir akibat lemahnya pengawasan serta rendahnya kepatuhan masyarakat.	pentingnya efektivitas implementasi kebijakan dalam memberikan pelayanan publik yang tertib dan bermanfaat. Perbedaan : Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi kebijakan retribusi parkir di ruang publik perkotaan dengan menekankan aspek pungutan, kepatuhan masyarakat, dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
3.	Adelia Safitri; Teki Prasetyo Sulaksono; M. Ayyub Abdul Aziz; M. Bagus Dewantara (2025)	Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Juru Parkir Liar Di Kota Bandar Lampung Kopusindo <i>Journals</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Bandar Lampung menilai keberadaan juru parkir liar secara beragam. Ada yang menerima karena membantu, tetapi banyak juga	Persamaan : Keduanya sama-sama mengangkat isu parkir sebagai bagian dari pelayanan publik, menekankan pentingnya kebijakan dalam

			yang menolak karena dianggap tidak teratur dan meresahkan. Kesimpulannya, pemerintah perlu membuat kebijakan tegas agar praktik parkir liar dapat diatur dengan baik.	menciptakan ketertiban dan kenyamanan, serta relevan dengan konteks di Provinsi Lampung. Perbedaan : Berfokus pada persepsi masyarakat terhadap praktik parkir liar di Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas kebijakan keamanan parkir di Universitas Lampung. Dari sisi objek, penelitian terdahulu melibatkan masyarakat kota, sedangkan penelitian ini meneliti civitas akademika kampus.
--	--	--	---	---

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Grand Theory

Dalam kajian administrasi publik, terdapat beberapa teori besar (*grand theory*) yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, teori pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga publik untuk kebutuhan masyarakat (Hardiyansyah, 2018). Dalam konteks perguruan tinggi, keamanan parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan publik non-akademik yang harus menjamin rasa aman bagi civitas akademika.

Kedua, teori organisasi, yang memandang organisasi sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari struktur, peran, dan koordinasi untuk mencapai tujuan (Siagian, 2022). Universitas Lampung sebagai organisasi pendidikan tinggi memerlukan struktur keamanan yang jelas, termasuk peran satpam, sistem parkir, hingga teknologi pendukung.

Ketiga, teori administrasi publik. Administrasi publik menekankan pada bagaimana kebijakan publik dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi (Thoha, 2017). Keamanan parkir termasuk kebijakan yang ditujukan untuk menciptakan keteraturan serta perlindungan aset civitas akademika.

Keempat, teori administrasi pembangunan, yang menekankan bagaimana administrasi diarahkan untuk mendukung pembangunan masyarakat dan lingkungan yang kondusif (Siagian, 2016). Keamanan parkir dapat dilihat sebagai bagian dari pembangunan lingkungan akademik yang aman dan produktif.

2.2.2 Middle Theory

Middle theory berfungsi menjembatani teori besar dengan teori terapan. Dalam penelitian ini digunakan teori efektivitas kebijakan publik. Kebijakan publik efektif jika mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan dukungan implementasi yang konsisten, sumber daya memadai, dan penerimaan masyarakat (Nugroho, 2017).

Indikator efektivitas kebijakan publik meliputi:

1. Kejelasan tujuan kebijakan : apakah ditujukan untuk menekan kehilangan kendaraan.
2. Konsistensi implementasi : sejauh mana aturan parkir dilaksanakan tanpa diskriminasi.
3. Ketersediaan sumber daya : jumlah satpam, fasilitas CCTV, portal parkir.
4. Dampak kebijakan : apakah tingkat kehilangan kendaraan menurun setelah kebijakan diterapkan.

2.2.3 Applied Theory

Dalam *applied theory*, terdapat beberapa teori yang langsung relevan dengan penelitian ini:

1. Teori Efektivitas Kebijakan Publik (Nugroho, 2017). Indikator: tujuan kebijakan, implementasi, sumber daya, dan dampak nyata. Paling cocok digunakan, karena dapat langsung mengukur apakah kebijakan keamanan parkir efektif dalam mengurangi kehilangan kendaraan.
2. Teori Manajemen Keamanan (Yudhistira, 2019). Fokus pada aspek manajemen risiko, penggunaan teknologi keamanan (CCTV, portal), serta peran personel keamanan.
3. Teori Kepuasan Pengguna Layanan Publik (Hardiyansyah, 2018). Keberhasilan kebijakan juga dapat dilihat dari kepuasan pengguna layanan, dalam hal ini civitas akademika yang merasa lebih aman.

Dari beberapa teori terapan tersebut, penelitian ini memilih teori efektivitas kebijakan publik sebagai teori utama karena memiliki indikator yang jelas, terukur, dan dapat dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

2.2.4 Efektivitas Kebijakan Publik dalam Prespektif Kualitatif

Efektivitas kebijakan publik tidak hanya dapat diukur dari angka atau statistik, tetapi juga dari sejauh mana tujuan kebijakan tersebut dirasakan, dipahami, dan diimplementasikan oleh para aktor yang terlibat. Dalam pendekatan kualitatif, efektivitas dipandang sebagai hasil dari interaksi kompleks antara kebijakan formal, implementasinya di lapangan, dan respons dari target kebijakan. Sebuah kebijakan bisa dianggap efektif jika ia mampu menciptakan perubahan yang diinginkan dan memberikan rasa aman serta kepercayaan di kalangan masyarakat.

Dalam kasus ini, kebijakan keamanan parkir di Universitas Lampung merupakan bentuk pelayanan publik yang bertujuan menciptakan lingkungan kampus yang aman. Pendekatan kualitatif akan menggali mengapa implementasi kebijakan ini, meskipun sudah ada, belum sepenuhnya efektif. Hal ini bisa dikaji melalui analisis terhadap faktor-faktor berikut:

1. Kualitas Perumusan Kebijakan: Apakah kebijakan yang ada sudah cukup jelas, komprehensif, dan relevan dengan tantangan keamanan di lapangan?. Apakah ada celah atau ketidakjelasan dalam regulasi yang memungkinkan terjadinya tindak kriminal?.

2. Kualitas Implementasi di Lapangan: Bagaimana petugas keamanan (satpam) menerapkan kebijakan sehari-hari?. Se jauh mana konsistensi mereka dalam menjalankan prosedur, seperti memeriksa karcis parkir atau memantau area dengan CCTV?.
 3. Dukungan Sumber Daya: Apakah jumlah petugas dan kualitas sarana pendukung (CCTV, portal) sudah memadai dan berfungsi optimal?. Bagaimana ketersediaan sumber daya ini memengaruhi kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan?.
- Melalui analisis mendalam ini, penelitian kualitatif dapat mengidentifikasi akar permasalahan yang tidak terlihat dari data statistik semata, seperti lemahnya sistem pengawasan atau sistem tiket yang tidak konsisten.

2.2.5 Fenomena Keamanan Parkir di Lingkungan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi memiliki peran ganda: sebagai pusat pendidikan (tridarma) dan sebagai entitas yang harus menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika. Keamanan parkir adalah salah satu isu yang sangat krusial karena kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan pokok dan alat transportasi utama bagi mahasiswa, dosen, dan staf.

Tingginya intensitas mobilitas kendaraan di Universitas Lampung menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan keamanan. Fenomena kehilangan kendaraan bermotor tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis, seperti rasa tidak aman dan keresahan di kalangan sivitas akademika. Lebih jauh, insiden berulang ini berpotensi merusak citra universitas sebagai institusi pendidikan yang seharusnya dapat memberikan rasa aman bagi penggunanya.

Penelitian ini akan mendalami persepsi dan pengalaman para pihak yang terdampak, yaitu pengguna (mahasiswa, dosen, staf) dan pengelola (Biro Umum dan Satpam). Dengan mengumpulkan narasi dan pengalaman langsung, kita dapat memahami secara holistik mengapa masalah keamanan ini terus terjadi dan bagaimana dampaknya dirasakan oleh individu.

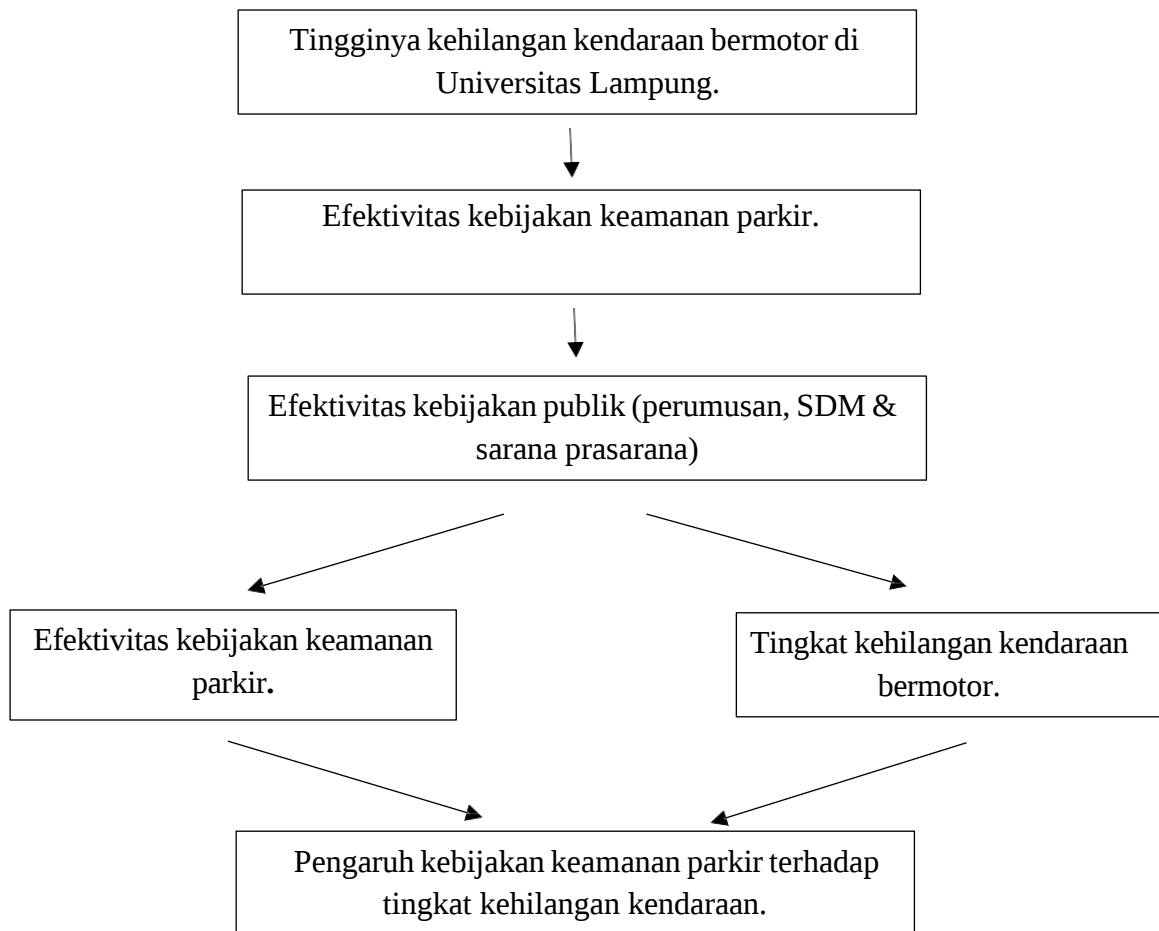
2.2.6 Tinjauan Terhadap Studi Terdahulu dan Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan penelusuran literatur, sebagian besar penelitian mengenai isu parkir di perguruan tinggi di Indonesia cenderung berfokus pada aspek teknis atau deskriptif, seperti kapasitas lahan atau desain tata ruang parkir. Kajian yang secara spesifik menghubungkan

antara efektivitas kebijakan keamanan dengan tingkat kehilangan kendaraan masih sangat terbatas.

Meskipun telah ada beberapa studi yang menyinggung tentang keamanan parkir, namun banyak di antaranya tidak menganalisis secara mendalam hubungan kausal antar variabel dengan pendekatan kualitatif. Kesenjangan ini membuka peluang untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, yang tidak hanya mengukur dampak, tetapi juga memahami proses dan faktor-faktor di baliknya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggali lebih dalam alasan di balik ketidak efektifan kebijakan keamanan parkir di Universitas Lampung.

2.3 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan keamanan parkir diimplementasikan di Universitas Lampung dan apa saja hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Menurut Creswell dan Poth (2018), pendekatan kualitatif berorientasi pada eksplorasi makna, bukan sekadar pengukuran. Penelitian kualitatif menekankan proses, konteks, dan pengalaman manusia dalam situasi sosial tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami realitas sosial yang kompleks melalui perspektif para pelaku yang terlibat langsung dalam kebijakan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study research). Studi kasus dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menelusuri fenomena tertentu secara mendalam, kontekstual, dan nyata di lapangan. Yin (2018) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, di mana batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak secara jelas.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada satu kasus spesifik, yaitu implementasi kebijakan keamanan parkir di Universitas Lampung, untuk menggali secara mendalam aspek-aspek yang memengaruhi efektivitas dan hambatan pelaksanaannya.

Pendekatan ini sesuai dengan paradigma interpretatif, yang menekankan pemahaman makna dan interpretasi tindakan sosial. Paradigma ini penting dalam kajian administrasi publik karena implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh struktur dan peraturan, tetapi juga oleh nilai, persepsi, serta interaksi antaraktor kebijakan (Denhardt & Denhardt, 2015).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Lampung (Unila), yang berlokasi di Bandar

Lampung, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive, karena Unila merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Sumatra bagian selatan dengan jumlah mahasiswa yang tinggi serta aktivitas kendaraan yang padat setiap hari.

Fenomena kehilangan kendaraan bermotor di area parkir kampus telah menjadi isu yang berulang dan bahkan mendapat perhatian dari media lokal serta Ombudsman RI Perwakilan Lampung (2025). Oleh karena itu, kampus ini menjadi lokasi yang relevan untuk meneliti implementasi kebijakan keamanan parkir secara mendalam.

Penelitian ini dilaksanakan selama Januari hingga Mei 2025, meliputi empat tahap utama, yaitu:

1. Tahap Persiapan: penyusunan instrumen wawancara, observasi, dan pengurusan izin penelitian.
2. Tahap Pengumpulan Data: pelaksanaan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen kebijakan.
3. Tahap Analisis Data: penyusunan hasil wawancara dan interpretasi temuan.
4. Tahap Penulisan Laporan: penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi akademik.

3.3 Fokus dan Objek Penelitian

Fokus penelitian ditetapkan untuk memberikan batasan terhadap ruang lingkup kajian agar analisis menjadi terarah dan mendalam. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama:

1. Implementasi kebijakan keamanan parkir di Universitas Lampung, yang mencakup: perumusan dan sosialisasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional (oleh satpam, biro umum, dan pihak parkir), mekanisme pengawasan dan evaluasi kebijakan.
2. Hambatan implementasi kebijakan keamanan parkir, baik yang bersifat: struktural, seperti keterbatasan sarana prasarana (CCTV, portal, pencahayaan), sumber daya manusia, dan regulasi teknis; nonstruktural, seperti rendahnya kesadaran pengguna parkir, lemahnya budaya keamanan, dan koordinasi antarunit.

Selain itu, penelitian ini juga melihat dampak implementasi kebijakan terhadap persepsi keamanan sivitas akademika, mengacu pada teori efektivitas kebijakan publik (Nugroho,

2017; Howlett & Ramesh, 2020).

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian (Sugiyono, 2019).

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dan observasi di lapangan. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi faktual tentang pelaksanaan kebijakan, hambatan, dan persepsi mereka terhadap keamanan parkir kampus.

2. Data Sekunder

Diperoleh dari dokumen kebijakan internal, laporan keamanan, notulensi rapat koordinasi, berita lokal, serta literatur ilmiah terkait implementasi kebijakan publik dan keamanan fasilitas kampus. Sumber sekunder juga mencakup jurnal nasional dan internasional seperti Fitria (2021), Yudhistira (2019), dan Cozens & Love (2015) yang membahas pendekatan keamanan berbasis desain lingkungan (CPTED).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang komprehensif dan kredibel, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan panduan wawancara namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka secara bebas.

Menurut Moleong (2021), wawancara mendalam berguna untuk menggali informasi yang bersifat subjektif dan kontekstual dari pengalaman informan.

Wawancara ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan seperti:

- 1) Bagaimana pelaksanaan kebijakan keamanan parkir dilakukan di tingkat kampus?

- 2) Apa saja kendala yang dihadapi petugas keamanan?
- 3) Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap sistem keamanan parkir?

2. Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung dalam lingkungan kampus untuk melihat aktivitas parkir, sistem kontrol tiket, penggunaan CCTV, serta prosedur penjagaan.

Spradley (2016) menyatakan bahwa observasi partisipatif memungkinkan peneliti memahami konteks sosial dari dalam sistem, bukan hanya melalui narasi informan.

Observasi dilakukan di tiga titik utama parkir kampus: area Fakultas Ekonomi, area Gedung Rektorat, dan area Fakultas Teknik. Catatan lapangan dibuat secara sistematis untuk mendukung data wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti tertulis yang relevan dengan kebijakan keamanan parkir. Dokumen yang dikaji antara lain:

SOP dan pedoman keamanan kampus, laporan kehilangan kendaraan, peraturan internal terkait parkir, publikasi berita dan pengumuman resmi universitas.

Menurut Bowen (2009), analisis dokumen penting untuk memberikan konteks dan validasi terhadap hasil wawancara dan observasi.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), yang mencakup tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Tahap ini meliputi pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disingkirkan, sedangkan data penting dikategorikan ke dalam tema-tema seperti “implementasi kebijakan”, “hambatan sumber daya”, dan “koordinasi antarunit”.

2. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk tabel, matriks, dan narasi deskriptif agar memudahkan peneliti dalam melihat pola hubungan antarvariabel sosial.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Peneliti menarik kesimpulan sementara berdasarkan pola yang ditemukan, kemudian melakukan verifikasi ulang melalui triangulasi data dan konfirmasi kepada informan.

3.8 Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan (trustworthiness) data, penelitian ini menggunakan empat kriteria dari Lincoln dan Guba (2013), yaitu:

1. Kredibilitas (Credibility)

Diperoleh melalui triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi ulang kepada informan (member check).

2. Transferabilitas (Transferability)

Dijaga dengan memberikan deskripsi kontekstual secara rinci agar hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi serupa di perguruan tinggi lain.

3. Dependabilitas (Dependability)

Menunjukkan konsistensi hasil penelitian melalui pencatatan proses penelitian secara rinci, termasuk prosedur wawancara dan analisis data.

4. Konfirmabilitas (Confirmability)

Dicapai dengan menjaga objektivitas peneliti melalui audit trail, yaitu jejak dokumentasi keputusan penelitian.

3.9 Etika Penelitian

Penelitian ini berpedoman pada prinsip etika penelitian sosial dan administrasi publik, yang menekankan penghormatan terhadap hak dan martabat informan (Israel & Hay, 2020).

Beberapa prinsip yang dijalankan antara lain:

1. Informed Consent – informan diberi penjelasan tentang tujuan penelitian dan menyetujui partisipasinya.

2. Kerahasiaan Data (Confidentiality) – identitas informan disamarkan untuk melindungi privasi.

3. Non-Maleficence – peneliti memastikan bahwa penelitian tidak merugikan pihak manapun.

4. Integrity – data yang dikumpulkan digunakan murni untuk tujuan akademik.

3.10 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian kualitatif ini terdiri dari beberapa tahap sistematis sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Menyusun rancangan penelitian, menelaah literatur, menentukan lokasi dan informan, serta menyiapkan instrumen penelitian seperti pedoman wawancara dan observasi.

2. Tahap Pengumpulan Data

Melaksanakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan pengumpulan dokumen sesuai jadwal penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Melakukan pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi data sesuai model Miles & Huberman.

4. Tahap Validasi Data

Melakukan triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi hasil kepada informan untuk memastikan akurasi temuan.

5. Tahap Penyusunan Laporan

Menyusun hasil penelitian dalam format skripsi, dengan analisis yang menghubungkan data empiris dan teori efektivitas kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, G. A. (2019). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Cozens, P., & Love, T. (2015). A Review and Current Status of Crime Prevention through Environmental Design (CPTED). *Journal of Planning Literature*, 30(4), 393–412.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- Faujan, S. (2022). Pengaruh fasilitas kampus, kualitas pengelolaan parkir, dan dukungan sosial terhadap persepsi keamanan mahasiswa. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Publik*, 9(2), 122–136.
- Fitria, D. (2021). Implementasi kebijakan keamanan lingkungan kampus di perguruan tinggi negeri. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Indonesia*, 8(1), 45–56.
- Fitria, N. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Keamanan Fasilitas Publik di Perguruan Tinggi. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 7(2), 88–102.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems (4th ed.)*. Oxford University Press.
- Hrp, I. T. M. (2023). *Implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Medan (Studi kasus pada Dinas Perhubungan Kota Medan)* [Skripsi, Universitas Medan Area]. Universitas Medan Area.
- Israel, M., & Hay, I. (2020). *Research Ethics for Social Scientists (2nd ed.)*. Sage Publications.
Jakarta: Bumi Aksara.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2023). *The Constructivist Credo*. Left Coast Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.)*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Naina, S. (2021). *Analisis pengaruh perilaku juru parkir, kurangnya lahan parkir dan jaminan keamanan terhadap parkir liar di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya* [Skripsi].

- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung. (2025). *Laporan Dugaan Maladministrasi dalam Pengelolaan Parkir di Kampus Negeri Lampung*. Bandar Lampung.
- Prambudi, R. S. A. (2023). Evaluasi efektivitas gedung parkir kampus dalam menunjang keamanan kendaraan bermotor. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil Indonesia*, 12(1), 77–86.
- Rozaki, M. (2019). Improving Campus Parking Security System: A Case Study in Indonesian University. *International Journal of Smart Mobility Studies*, 4(2), 88–96.
- Safitri, A., Sulaksono, T. P., Abdul Aziz, M. A., & Dewantara, M. B. (2025). Persepsi masyarakat terhadap keberadaan juru parkir liar di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2), 995–1004.
- Siagian, S. P. (2016). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*.
- Siagian, S. P. (2022). *Teori Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Spradley, J. P. (2016). *Participant Observation*. Waveland Press.
- Subarsono, A. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2017). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Wahab, S. A. (2017). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijayanti, A. (2020). Penerapan Konsep CPTED dalam Sistem Keamanan Parkir Perguruan Tinggi. *Jurnal Arsitektur dan Perkotaan Indonesia*, 7(3), 201–214.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.)*. Sage Publications.
- Yudhistira, I. (2019). Manajemen Keamanan Lingkungan Kampus. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Indonesia*, 5(1), 22–34.
- Mustofa, G. K. (2024). Optimalisasi penyuluhan Satuan Binmas melalui Program Djimat dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Banyumas 8(5), 1–10. <https://doi.org/10.70526/psr.v8i5.11>